

**ANALISIS PERBEDAAN PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH DI INDONESIA PADA PERIODE  
SEBELUM DAN SELAMA COVID-19**



**DISUSUN OLEH:**

**OTMAR AJULPON PURBA**

**12200558**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS BISNIS**

**UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA**

**YOGYAKARTA**

**2025**

**ANALISIS PERBEDAAN PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH DI INDONESIA PADA PERIODE  
SEBELUM DAN SELAMA COVID-19**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar**

**Sarjana Akuntansi (S.Ak.)**



**DISUSUN OLEH:**

**OTMAR AJULPON PURBA**

**12200558**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS BISNIS**

**UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA**

**YOGYAKARTA**

**2025**

**HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis

Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat

Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Akuntansi

**DISUSUN OLEH:**

**OTMAR AJULPON PURBA**

**12200558**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS BISNIS**

**UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA**

**YOGYAKARTA**

**2025**

## PERNYATAAN PENYERAHAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Otmar Ajulpon Purba  
NIM/NIP/NIDN : 12200558  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Karya Ilmiah : Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah di Indonesia pada Periode Sebelum dan Selama COVID-19

dengan ini menyatakan :

- a. bahwa karya yang saya serahkan ini merupakan revisi terakhir yang telah disetujui pembimbing/promotor/reviewer.
- b. bahwa karya saya dengan judul di atas adalah asli dan belum pernah diajukan oleh siapa pun untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kristen Duta Wacana maupun di universitas/institusi lain.
- c. bahwa karya saya dengan judul di atas sepenuhnya adalah hasil karya tulis saya sendiri dan bebas dari plagiasi. Karya atau pendapat pihak lain yang digunakan sebagai rujukan dalam naskah ini telah dikutip sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.
- d. bahwa saya bersedia bertanggung jawab dan menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku berupa pencabutan gelar akademik jika di kemudian hari didapati bahwa saya melakukan tindakan plagiasi dalam karya saya ini.
- e. bahwa Universitas Kristen Duta Wacana tidak dapat diberi sanksi atau tuntutan hukum atas pelanggaran hak kekayaan intelektual atau jika terjadi pelanggaran lain dalam karya saya ini. Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran dalam karya saya ini akan menjadi tanggung jawab saya pribadi, tanpa melibatkan pihak Universitas Kristen Duta Wacana.
- f. menyerahkan hak bebas royalti noneksklusif kepada Universitas Kristen Duta Wacana, untuk menyimpan, melestarikan, mengalihkan dalam media/format lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), dan mengunggahnya di Repositori UKDW tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan pemilik hak cipta atas karya saya di atas, untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- g. bahwa saya bertanggung jawab menyampaikan secara tertulis kepada Universitas Kristen Duta Wacana jika di kemudian hari terdapat perubahan hak cipta atas karya saya ini.

h. bahwa meskipun telah dilakukan pelestarian sebaik-baiknya, Universitas Kristen Duta Wacana tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan karya atau metadata selama disimpan di Repositori UKDW.

i. mengajukan agar karya saya ini: (*pilih salah satu*)

- Dapat diakses tanpa embargo.
- Dapat diakses setelah 2 tahun.\*
- Embargo permanen.\*

Embargo: penutupan sementara akses karya ilmiah.

\*Halaman judul, abstrak, dan daftar pustaka tetap wajib dibuka.

Alasan embargo (*bisa lebih dari satu*):


- dalam proses pengajuan paten.
- akan dipresentasikan sebagai makalah dalam seminar nasional/internasional.\*\*
- akan diterbitkan dalam jurnal nasional/internasional.\*\*
- telah dipresentasikan sebagai makalah dalam seminar nasional/internasional ... dan diterbitkan dalam prosiding pada bulan ... tahun ... dengan DOI/URL ... \*\*\*
- telah diterbitkan dalam jurnal ... dengan DOI/URL artikel ... atau vol./no. ... \*\*\*
- berisi topik sensitif, data perusahaan/pribadi atau informasi yang membahayakan keamanan nasional.
- berisi materi yang mengandung hak cipta atau hak kekayaan intelektual pihak lain.
- terikat perjanjian kerahasiaan dengan perusahaan/organisasi lain di luar Universitas Kristen Duta Wacana selama periode tertentu.
- Lainnya (mohon dijelaskan)

\*\*Setelah diterbitkan, mohon informasikan keterangan publikasinya ke repository@staff.ukdw.ac.id.

\*\*\*Tuliskan informasi kegiatan atau publikasinya dengan lengkap.

Yogyakarta, 26 Mei 2025

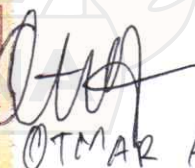
Mengetahui,



Rosalina Christanti

Tanda tangan & nama terang pembimbing  
NIDN/NIDK 0528089301

Yang menyatakan,



OTMAR AJULPON PURBA

Tanda tangan & nama terang pemilik karya/penulis  
NIM 12200558

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

### “ANALISIS PERBEDAAN PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI INDONESIA PADA PERIODE SEBELUM DAN SELAMA COVID-19”

telah diajukan dan dipertahankan oleh:

**OTMAR AJULPON PURBA**

12200558

dalam Ujian Skripsi Program Studi Akuntansi

Fakultas Bisnis

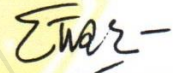
Universitas Kristen Duta Wacana

dan dinyatakan DITERIMA untuk menerima salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada tanggal 11 April 2025

Nama Dosen

Tanda Tangan

1. Albertus Henri Listyanto Nugroho, S.E., M.Sc.  
(Ketua Tim Penguji)
2. Dra. Erni Ekawati, MBA., MSA., Ph.D.  
(Dosen Penguji)
3. Rossalina Christanti, S.E., M.Acc.  
(Dosen Pembimbing)



Yogyakarta, 6 Mei 2025

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Bisnis

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Perminas Pangeran, SE., M.Si.



Rossalina Christanti, S.E., M.Acc.

## **HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI**

### **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi dengan judul:

#### **ANALISIS PERBEDAAN PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI INDONESIA PADA PERIODE SEBELUM DAN SELAMA COVID-19**

Yang saya kerjakan untuk melengkapi sebagian syarat untuk menjadi Sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta adalah bukan hasil tiruan atau duplikasi dari karya pihak lain di Perguruan Tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasi sudah dicantumkan sebagaimana mestinya.

Jika dikemudian hari didapati bahwa hasil skripsi ini adalah hasil plagiasi atau tiruan dari karya pihak lain, maka saya bersedia dikenai sanksi yakni pencabutan gelar saya.

Yogyakarta, 4 Maret 2025



**Otmar Ajulpon Purba**

**12200558**

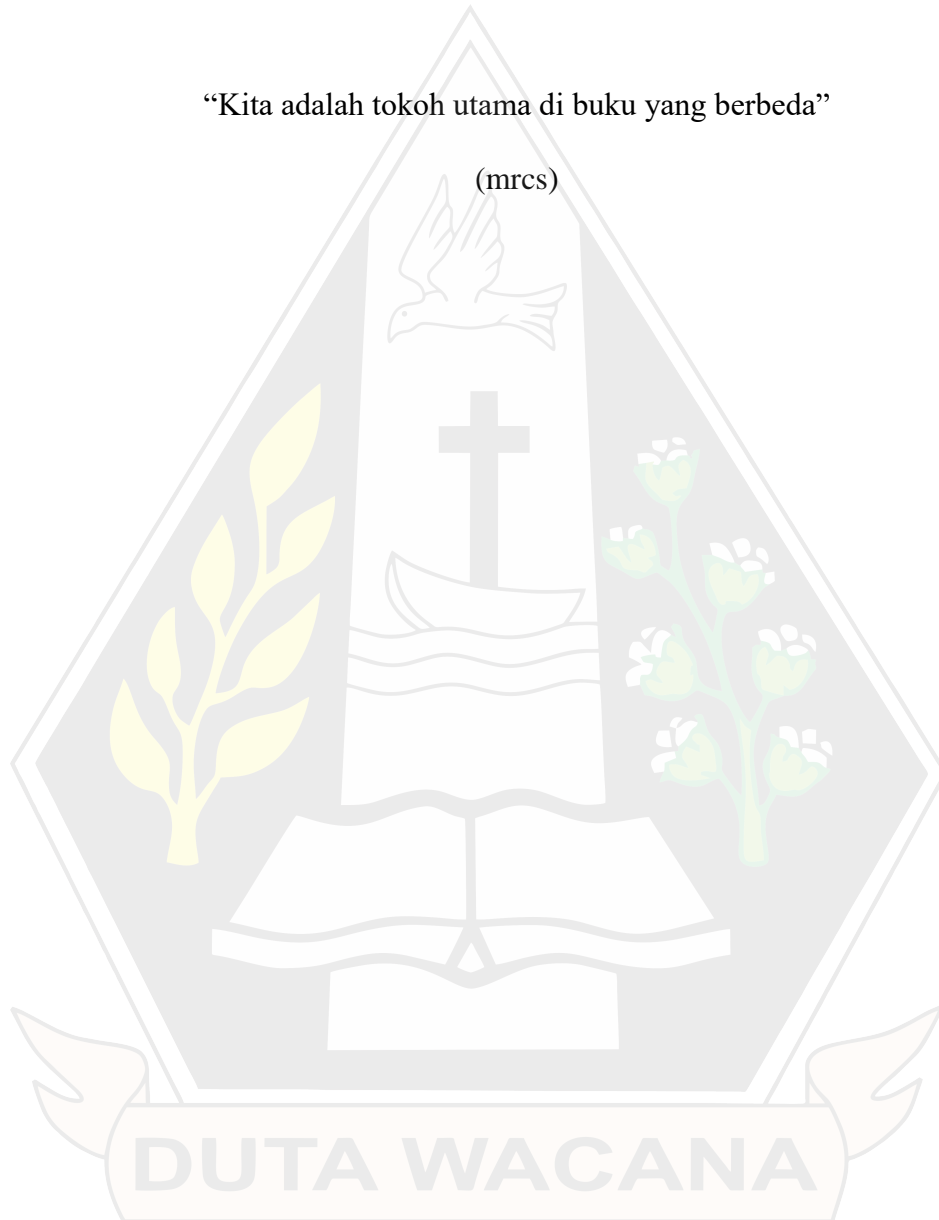
## HALAMAN MOTO

“Nilai seseorang dari pertanyaannya bukan dari jawabannya”

(Voltaire)

“Kita adalah tokoh utama di buku yang berbeda”

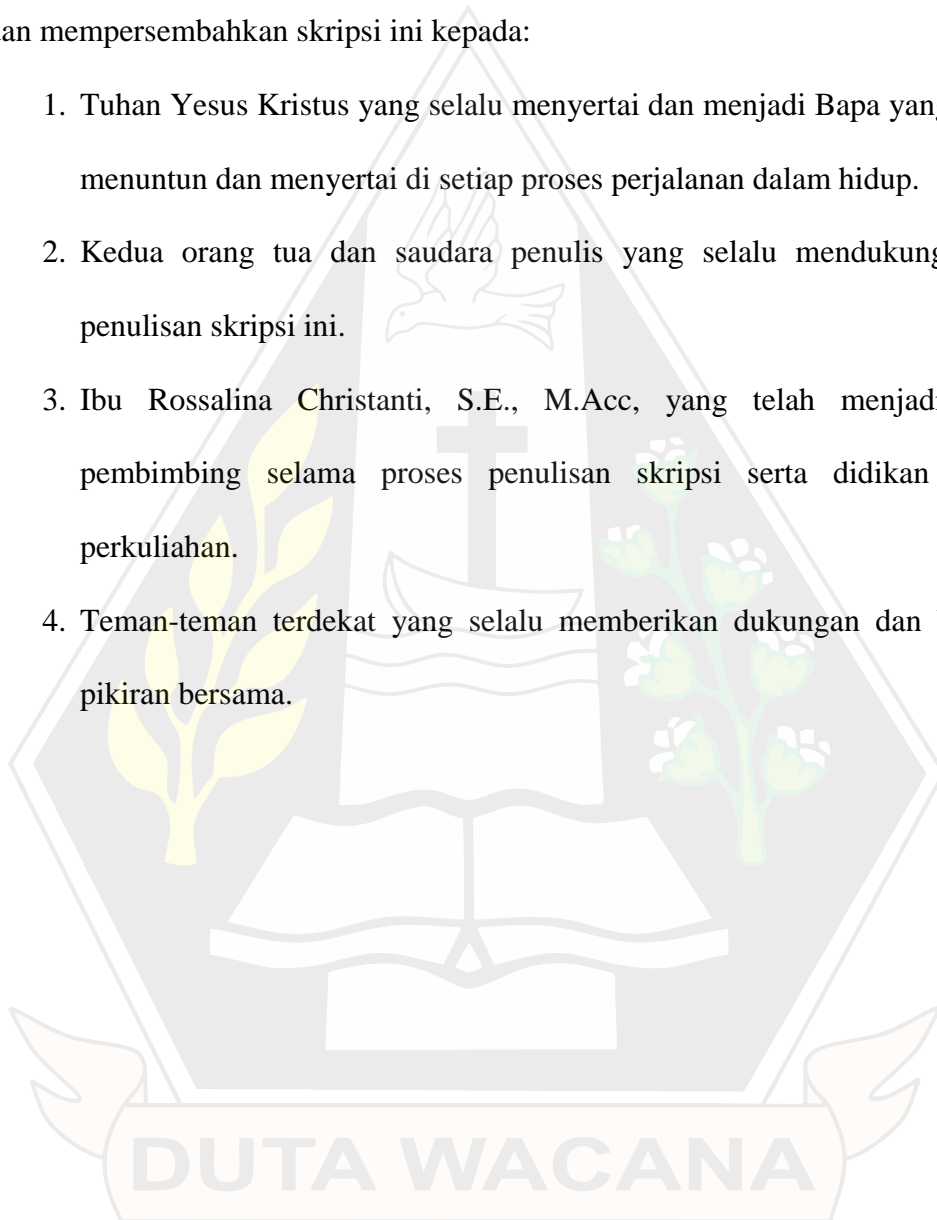
(mrcs)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis memahami bahwa tanpa adanya dukungan yang diperlukan selama proses perkuliahan hingga penulisan skripsi ini. Dengan demikian, penulis berterima kasih dan mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai dan menjadi Bapa yang selalu menuntun dan menyertai di setiap proses perjalanan dalam hidup.
2. Kedua orang tua dan saudara penulis yang selalu mendukung dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Rossalina Christanti, S.E., M.Acc, yang telah menjadi dosen pembimbing selama proses penulisan skripsi serta didikan selama perkuliahan.
4. Teman-teman terdekat yang selalu memberikan dukungan dan bertukar pikiran bersama.



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan karunia dalam setiap proses penyelesaian penelitian skripsi ini dengan baik.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung serta memberikan motivasi kepada penulis. Rasa terima kasih saya sampaikan dengan hormat kepada:

1. Ibu Rossalina Christanti, S.E., M.Acc, sebagai Kepala Program Studi sekaligus pembimbing skripsi yang telah memberikan pengarahan dan ilmu kepada penulis dengan kesempatan waktu Beliau untuk berdiskusi, bertukar pikiran, bimbingan serta arahan terkait penulisan dan penelitian dari skripsi ini
2. Orang tua dan saudara penulis yang tiada hentinya selalu mendukung dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Edy Nugroho, S.E., M.Sc. sebagai Pengelola Laboratorium Statistik Fakultas Bisnis yang telah memberikan ilmu dan pengarahan dalam proses penulisan skripsi ini.
4. Seluruh karyawan dan karyawan administrasi Universitas Kristen Duta Wacana yang telah memberikan dukungan dan proses administrasi selama perkuliahan.

5. Teman-teman selama perkuliahan, Shandra, Yoan, Ranalis, Angela, Gita serta teman-teman seperbimbingan dengan bu Rossa dan teman-teman basecamp.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi motivasi bagi rekan-rekan untuk meneliti dan menyempurnakan lebih lanjut terkait dengan konten dan isi penelitian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon maaf apabila terdapat kekeliruan dan segala yang tidak berkenan dalam penulisan penelitian ini. Penulis juga berharap, saran serta kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberikan kasih karuniaNYA kepada semua pihak yang telah mendidik serta membantu penulis selama perkuliahan hingga penulisan skripsi selesai ditulis.

Yogyakarta, 4 Maret 2025



Otmar Ajulpon Purba

DUTA WACANA

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG LUAR .....	i
HALAMAN SAMBUNG DALAM .....	ii
HALAMAN PENGANTAR SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI .....	v
HALAMAN MOTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
<i>ABSTRACT</i> .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kontribusi Penelitian .....	8
1.5 Batasan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori .....	11
2.1.1 Peacock dan Wiseman .....	11
2.2 Pajak Daerah.....	15
2.2.1 Pajak Provinsi .....	15
2.2.2 Pajak Kabupaten atau Kota.....	15
2.3 Retribusi Daerah .....	15
2.3.1 Retribusi Jasa Umum.....	16
2.3.2 Retribusi Jasa Usaha.....	16
2.3.3 Retribusi Perizinan Tertentu.....	17

2.4 Penelitian Terdahulu .....	17
2.5 Hipotesis Penelitian .....	19
2.6 Pengembangan Hipotesis.....	21
2.6.1 Perbedaan Pajak Daerah Sebelum dan Selama COVID-19 di Indonesia.....	21
2.6.2 Perbedaan Retribusi Daerah Sebelum dan Selama COVID-19 di Indonesia.....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>22</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	22
3.2 Data dan Sumber .....	22
3.2.1 Pajak Daerah (PD) seluruh Indonesia .....	22
3.2.1.1 Pajak Provinsi: .....	22
3.2.1.2 Pajak Kabupaten dan Kota: .....	22
3.2.2 Retribusi Daerah (RD) seluruh Indonesia terdiri dari: .....	23
3.2.2.1 Jasa Umum .....	23
3.2.2.2 Jasa Usaha .....	24
3.2.2.3 Perizinan Tertentu .....	25
3.3 Metode dan Pengumpulan Data.....	25
3.4 Langkah-Langkah Penelitian .....	26
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
4.1 Populasi Penelitian .....	27
4.2 Teknik Pengumpulan Data .....	28
4.3 Pembahasan .....	28
4.3.1 Statistik Deskriptif.....	28
4.3.2 Analisis Grafik.....	35
4.4 Hasil Uji Hipotesis.....	40
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>55</b>
5.1 Kesimpulan .....	55
5.2 Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>59</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Populasi Penelitian.....	27
Tabel 4.2 Uji Deskriptif Pajak Provinsi di Indonesia .....	28
Tabel 4.3 Uji Deskriptif Pajak Kabupaten dan Kota di Indonesia.....	30
Tabel 4.4 Uji Deskriptif Retribusi Provinsi Kabupaten dan Kota di Indonesia.....	34



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Penerimaan Pajak Provinsi di Indonesia.....	35
Grafik 4.2 Penerimaan Pajak Kabupaten dan Kota di Indonesia.....	37
Grafik 4. 3 Penerimaan Retribusi Daerah di Indonesia.....	39



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabulasi data Pajak Provinsi di Indonesia tahun 2018-2020.....	59
Lampiran 2 Tabulasi data Pajak Kabupaten dan Kota di Indonesia tahun 2018-2020 .....	65
Lampiran 3 Tabulasi data Retribusi Provinsi Kabupaten dan Kota di Indonesia tahun 2018-2020 .....	174
Lampiran 4 Uji beda Pajak Provinsi di Indonesia tahun 2018-2020 .....	243
Lampiran 5 Uji beda Pajak Kabupaten dan Kota di Indonesia tahun 2018-2020 .....	244
Lampiran 6 Uji beda Retribusi Provinsi Kabupaten dan Kota di Indonesia tahun 2018-2020 .....	246
Lampiran 7 Halaman Persetujuan .....	247
Lampiran 8 Kartu Konsultasi .....	248
Lampiran 9 Lembar Revisi .....	249
Lampiran 10 Screenshot Poin Keaktifan .....	250
Lampiran 11 Screenshot Turnitin .....	251

DUTA WACANA

**ANALISIS PERBEDAAN PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH DI INDONESIA PADA PERIODE  
SEBELUM DAN SELAMA COVID-19**

**Otmar Ajulpon Purba**

**12200558**

**Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis**

**Universitas Kristen Duta Wacana**

**Email: [otmarpurba26@gmail.com](mailto:otmarpurba26@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia sebelum dan selama COVID-19. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2018-2020. Pengumpulan data menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan penerimaan pajak daerah pada tingkat provinsi pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan terdapat perbedaan signifikan sebelum dan selama COVID-19. Kemudian pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak rokok tidak ada perbedaan signifikan. Pada pajak tingkat kabupaten dan kota pajak hiburan terdapat perbedaan. Namun, pajak hotel memiliki varians signifikan dan uji beda yang tidak signifikan karena beberapa daerah yang ada di Indonesia memiliki jumlah hotel yang tidak banyak. Selanjutnya untuk penerimaan retribusi daerah provinsi kabupaten dan kota pada retribusi jasa usaha terdapat perbedaan signifikan sebelum dan selama COVID-19. Pada retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu tidak ada perbedaan signifikan sebelum dan selama COVID-19.

**Kata kunci:** Pajak Daerah, Retribusi Daerah, COVID-19

**ANALYSIS OF DIFFERENCES IN REGIONAL TAX AND RETRIBUTION  
REVENUES IN INDONESIA IN THE PERIOD  
BEFORE AND DURING COVID-19**

**Otmar Ajulpon Purba**

**12200558**

***Department Accounting Faculty Business***

***Duta Wacana Christian University***

**Email: [otmarpurba26@gmail.com](mailto:otmarpurba26@gmail.com)**

**ABSTRACT**

*This study aims to explain the differences in local taxes and levies in Indonesia before and during COVID-19. The data used in this study are secondary data from the Regional Government Financial Statements (LKPD) of all provinces and districts / cities in Indonesia in 2018-2020. Data collection uses quantitative descriptive methods. The results showed that local tax revenue at the provincial level of motor vehicle fuel tax and surface water tax had significant differences before and during COVID-19. Then motor vehicle tax, motor vehicle title transfer duty and cigarette tax have no significant difference. At the district and city level taxes, there is a difference in entertainment tax. However, hotel tax has a significant variance and an insignificant difference test because some regions in Indonesia have a small number of hotels. Furthermore, for district and city provincial levy revenues on business service levies, there are significant differences before and during COVID-19. In general service levies and certain license levies there is no significant difference before and during COVID-19.*

**Keywords:** *Local Tax, Local Retribution, COVID-19*

**DUTA WACANA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang mana memiliki pulau jumlah terdiri dari 17.001 pulau menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2024 (BPS 2024). Sebagai negara dengan sistem pemerintahan otonomi daerah, setiap daerah merencanakan dan mengelola urusan sesuai aturan yang ditentukan, dengan tujuan agar setiap kebijakan yang diambil berjalan tepat sasaran, serta menciptakan pemerataan pembangunan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Indonesia dibagi menjadi 38 provinsi di mana setiap wilayah administratif dibagi menjadi provinsi, kabupaten dan kota untuk meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan kebijakan di setiap daerah.

Setiap daerah memiliki kewenangan dalam mengelola atas sumber daya dan potensinya sendiri sebagai bagian dari otonomi daerah, termasuk kemampuan untuk memungut dan mengumpulkan pajak daerah. Dua jenis pungutan yang dilaksanakan pemerintah daerah sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna mendanai pembangunan daerah dan operasi pemerintahan adalah pajak dan retribusi daerah. Efisiensi operasi pemerintahan, penyediaan layanan publik, dan pertumbuhan sektor ekonomi masing-masing daerah sangat terbantu adanya pajak dan retribusi.

Pajak daerah mencakup jenis pungutan yang dibebankan kepada masyarakat dan badan usaha yang beroperasi di suatu daerah, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),

serta Pajak Air Tanah. Sedangkan, retribusi daerah dikenakan atas layanan tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah yang mana terdiri dari retribusi pasar, retribusi parkir, dan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB). Kedua jenis pungutan ini berfungsi untuk mendukung pembiayaan berbagai program daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas publik, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun, meskipun pajak dan retribusi daerah memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan daerah, pelaksanaannya seringkali menghadapi tantangan, seperti ketidakmerataan dalam pengumpulan pungutan, kurangnya kesadaran masyarakat, dan pengelolaan dana yang belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, pengelolaan pajak dan retribusi daerah dilakukan secara transparan, efektif dan akuntabel sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Setiap daerah berhak menentukan kebijakannya sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap daerah berwenang mengenakan pajak kepada penduduknya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. Pajak dan pungutan wajib lainnya merupakan contoh kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Salah satu pungutan yang diatur oleh pemerintah untuk mendukung efektivitas dan efisiensi daerah adalah pajak dan pungutan daerah. Pemerintah daerah memiliki optimisme bahwa otonomi daerah akan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Seiring dengan harapan tersebut, ada beberapa masalah dan beban yang perlu diperhatikan, seperti semakin banyaknya layanan publik yang sangat penting bagi masyarakat dari tahun ke tahun serta meningkatnya jumlah penduduk dan taraf hidup. Upaya untuk mengatasi masalah dan beban tersebut memerlukan keterlibatan pemerintah secara terus-menerus. Peningkatan peran

pemerintah dalam penyelesaian masalah menyebabkan semakin besarnya dana yang dibutuhkan untuk belanja pemerintah dalam rangka pelayanan publik dan masyarakat (Halkadri 2016).

Seiring berjalannya waktu, paradigma pembangunan nasional di Indonesia telah mengalami transformasi dari waktu ke waktu. Pada awalnya, pembangunan lebih mementingkan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cepat daripada mendistribusikan hasil pembangunan ke seluruh Indonesia. Namun seiring dengan semakin rumitnya permasalahan dari waktu ke waktu, pembangunan nasional juga telah berubah. Pergeseran ini menghasilkan paradigma pembangunan yang lebih adil, yang berupaya untuk menutup kesenjangan antara daerah dan pusat serta menjamin bahwa setiap daerah memperoleh manfaat yang sama dari hasil pertumbuhan. Kebijakan otonomi daerah menjadi krusial dalam situasi ini karena memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya serta potensi daerah berdasarkan kondisi dan kebutuhan daerah. Di Indonesia Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaannya diatur dalam UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan tugas politik dan administratif antara pemerintah pusat provinsi, serta kabupaten dan kota. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan dapat memiliki keleluasaan untuk membuat kebijakan sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga dapat mempercepat proses pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.

Namun, meskipun UU No. 22 Tahun 1999 mengatur kewenangan pemerintah pusat dan daerah, pada praktik implementasinya tidak selalu berjalan mulus. Undang-undang ini menetapkan bahwa daerah otonom tidak memiliki hubungan hierarkis dengan pemerintahan di atasnya. Artinya, pemerintah daerah tidak lagi

berada di bawah kendali langsung pemerintah pusat atau provinsi, tetapi memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan di tingkat daerahnya masing-masing. Hal ini, meskipun memberikan keleluasaan, telah menciptakan ketegangan dalam hubungan pemerintah, terutama di tingkat kabupaten dan kota. Misalnya, banyak bupati dan wali kota yang merasa tidak perlu dibina oleh gubernur, yang meskipun merupakan wakil pemerintah pusat, seringkali dipandang sebagai pihak yang tidak berkompeten dalam menangani urusan lokal. Ketidaktepahaman dan ketegangan ini berpotensi mengganggu efektivitas implementasi kebijakan pembangunan yang seharusnya dilakukan secara terpadu dan sinergis antara pemerintahan pusat dan daerah. Sementara kebijakan desentralisasi yang ditetapkan memberikan dampak yang signifikan terhadap pemerintah daerah dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan di daerahnya masing-masing, pemerintah pusat tetap memegang kendali atas perencanaan nasional dan pembangunan makro. Oleh karena itu, kesulitan dalam hubungan antara pusat dan daerah masih perlu diatasi, meskipun perubahan paradigma pembangunan menuju pemerataan dan desentralisasi sangat menjanjikan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan di daerah. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih adil, besarnya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah harus diimbangi dengan koordinasi yang efektif antara daerah dan pusat.

Bermula dari kejadian yang terjadi di Wuhan, Tiongkok pandemi COVID-19 kini telah meluas secara global melalui penularan lokal. Penyebaran virus ini sangat cepat, dengan negara di Asia Timur dan Pasifik, termasuk China, mengalami dampak besar pada perekonomiannya. Seperti yang diperkirakan oleh Bank Dunia,

pandemi COVID-19 diprediksi akan menghentikan laju pertumbuhan ekonomi di beberapa negara berkembang, termasuk di Indonesia, yang sangat bergantung pada sektor tertentu yang terpengaruh oleh pembatasan sosial dan kegiatan ekonomi yang terganggu (Arianto 2021).

Wabah COVID-19 telah berdampak besar pada perekonomian Indonesia, yang mempengaruhi beberapa sektor utama, termasuk ketenagakerjaan dan industri, menurut Kementerian Keuangan pemerintah. Daya beli masyarakat menurun akibat pembatasan kegiatan sosial dan komersial sebagai upaya menghentikan penyebaran virus. Di beberapa sektor, hal ini mengakibatkan peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK). Banyak perusahaan, terutama organisasi skala kecil dan menengah, terpaksa tutup akibat kebijakan yang diberlakukan hampir di seluruh dunia (Kraus et al. 2020). Pemerintah Indonesia telah memberlakukan berbagai langkah pembatasan sosial, termasuk pembatasan fisik dan sosial serta PSBB pada tahun 2020 dalam menanggulangi penyebaran virus COVID-19. Kebijakan ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pergerakan masyarakat dan aktivitas ekonomi di sektor perdagangan, jasa, pariwisata, dan sektor-sektor lainnya. Kebijakan-kebijakan ini diberlakukan secara bertahap mulai Maret 2020 dan berlanjut dalam jangka waktu yang panjang.

Keterbatasan ini tidak hanya berdampak pada kesehatan dan kehidupan sosial, tetapi juga secara signifikan mengurangi aktivitas ekonomi, yang pada gilirannya mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Karena secara langsung mempengaruhi pencapaian tujuan dan realisasi pendapatan pajak daerah, penurunan aktivitas ekonomi yang disebabkan oleh keterbatasan ini perlu diperhitungkan. Karena penurunan pendapatan perusahaan, daya beli masyarakat, dan aktivitas ekonomi,

pajak daerah sumber utama pendanaan bagi banyak pemerintah daerah telah turun. Hal ini menyulitkan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan inisiatif pembangunan daerah dan mengelola keuangan, dan kebutuhan akan bantuan sosial dan keuangan semakin mendesak. Mengingat meluasnya dampak epidemi COVID-19, penting untuk memahami bagaimana keputusan kebijakan sosial dan dampaknya terhadap ekonomi dan pemungutan pajak daerah dapat mempengaruhi perencanaan fiskal Indonesia dan rencana pemulihan ekonomi daerah. Dampak jangka panjang pandemi COVID-19 juga menjadi contoh betapa pentingnya kebijakan fiskal yang fleksibel dan adaptif dalam menangani krisis internasional seperti ini.

Keterbatasan dalam kehidupan sosial dan bisnis, yang menurunkan daya beli masyarakat dan menyebabkan pemutusan hubungan kerja (Arianto 2021). Akibatnya, banyak bisnis di seluruh dunia harus menutup operasinya (Kraus et al. 2020). Hal ini mengakibatkan pembatasan sosial berskala besar berupa social distancing & physical distancing. Dampaknya terhadap tujuan dan realisasi pendapatan pajak daerah, pengurangan aktivitas ekonomi yang diakibatkan oleh pembatasan ini.

Sistem kesehatan, ekonomi, dan sosial telah terdampak parah oleh epidemi COVID-19. Daerah dan wilayah tidak terdampak secara merata oleh krisis di seluruh negeri. Operasi penanggulangan harian menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan lokal, sedangkan manajemen krisis menjadi tanggung jawab pemerintah federal. Bergantung pada seberapa cepat virus dapat diberantas, seberapa keras pemerintah bekerja untuk menanggulangnya, dan seberapa banyak bantuan keuangan yang diberikan selama dan setelah wabah, dampaknya akan

bervariasi (Oktavia et al. 2023). Mereka juga bertugas menjamin layanan sosial dan kesehatan, serta mendorong investasi publik dan perluasan ekonomi. Perekonomian global telah terpengaruh oleh wabah COVID-19, khususnya di Indonesia (Chairani 2020). Banyak restoran, hotel, tempat hiburan, mal, dan pusat perbelanjaan yang terpaksa tutup akibat PSBB, salah satu inisiatif pemerintah untuk membendung penyebaran COVID-19. Namun, pajak provinsi kabupaten dan kota merupakan sumber pendanaan terbesar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam menegakkan pajak, salah satu cara utama negara untuk memperoleh pendapatan, maka diperhatikan unsur keadilan serta tingkat daya saing perekonomian yang ada (Ilanoputri 2020). Upaya pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19 atau yang dikenal dengan PSBB, berdampak pada penurunan penerimaan pajak daerah yang merupakan sumber PAD terbesar dan sumber utama pendanaan bagi kabupaten/kota (Widiyanto<sup>3</sup>, Aji, dan Primastiwi 2023). Agar suatu negara dapat mencapai tujuan kesejahteraan dan kemakmuran sosialnya, pajak sangatlah penting (Hadian dan Ernandi 2022). Selain menjadi sarana untuk memaksakan keterlibatan aktif individu melalui undang-undang yang bersifat memaksa, pajak membantu mendanai pengeluaran pemerintah (Wahyu 2023). Setiap provinsi, kabupaten, dan kota berhak atas otonomi untuk mengatur serta mengawasi urusan dan kepentingannya sendiri (Moonti 2017). Pajak dan retribusi daerah merupakan kontribusi terbesar dalam sumber pendapatan, yang mencakup semua dana yang diterima oleh daerah dari sumber-sumber ekonomi (Sarundayang, Karamoy, dan Lambey 2018). Menurut (Mardiasmo, 2016), Menurut undang-undang, pajak daerah harus dibayarkan oleh orang atau badan usaha yang sah kepada daerah maka, pajak tersebut digunakan untuk kepentingan

daerah secara keseluruhan dan tidak dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan langsung. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah di Indonesia pada Periode Sebelum dan Selama COVID-19**”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini meneliti:

1. Apakah terdapat perbedaan penerimaan pajak daerah pada periode sebelum dan selama COVID-19?
2. Apakah terdapat perbedaan penerimaan retribusi daerah pada periode sebelum dan selama COVID-19?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji perbedaan penerimaan pajak daerah sebelum dan selama pandemi COVID-19.
2. Menguji perbedaan penerimaan retribusi daerah sebelum dan selama pandemi COVID-19.

### **1.4 Kontribusi Penelitian**

Diharapkan bahwa peneliti mengenai dampak pajak dan retribusi daerah pada fenomena sebelum dan selama pandemi COVID-19 dapat meningkatkan pemahaman dan pengembangan kebijakan keuangan daerah. Penelitian ini juga

memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan dalam mengelola keuangan daerah di tengah situasi krisis seperti pandemi. Berikut adalah beberapa manfaat dari penelitian ini:

- 1) Diharapkan dapat menambah literatur tentang pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah sebelum pandemi COVID-19 dan selama pandemi COVID-19.
- 2) Melalui analisis tentang perbedaan pajak daerah dan retribusi daerah sebelum pandemi COVID-19 dan selama pandemi COVID-19 menjadi pelajaran, pengalaman, dan pertimbangan dalam penanganan pajak selama pandemi yang membuat perekonomian tidak stabil.
- 3) Menambah informasi terhadap masyarakat tentang kondisi perpajakan daerah selama pandemi COVID-19. Bagi pihak lain, khususnya para peneliti yang akan datang, hasilnya diharapkan dapat menjadi sumber literatur untuk penelitian lebih lanjut tentang akuntansi sektor publik.

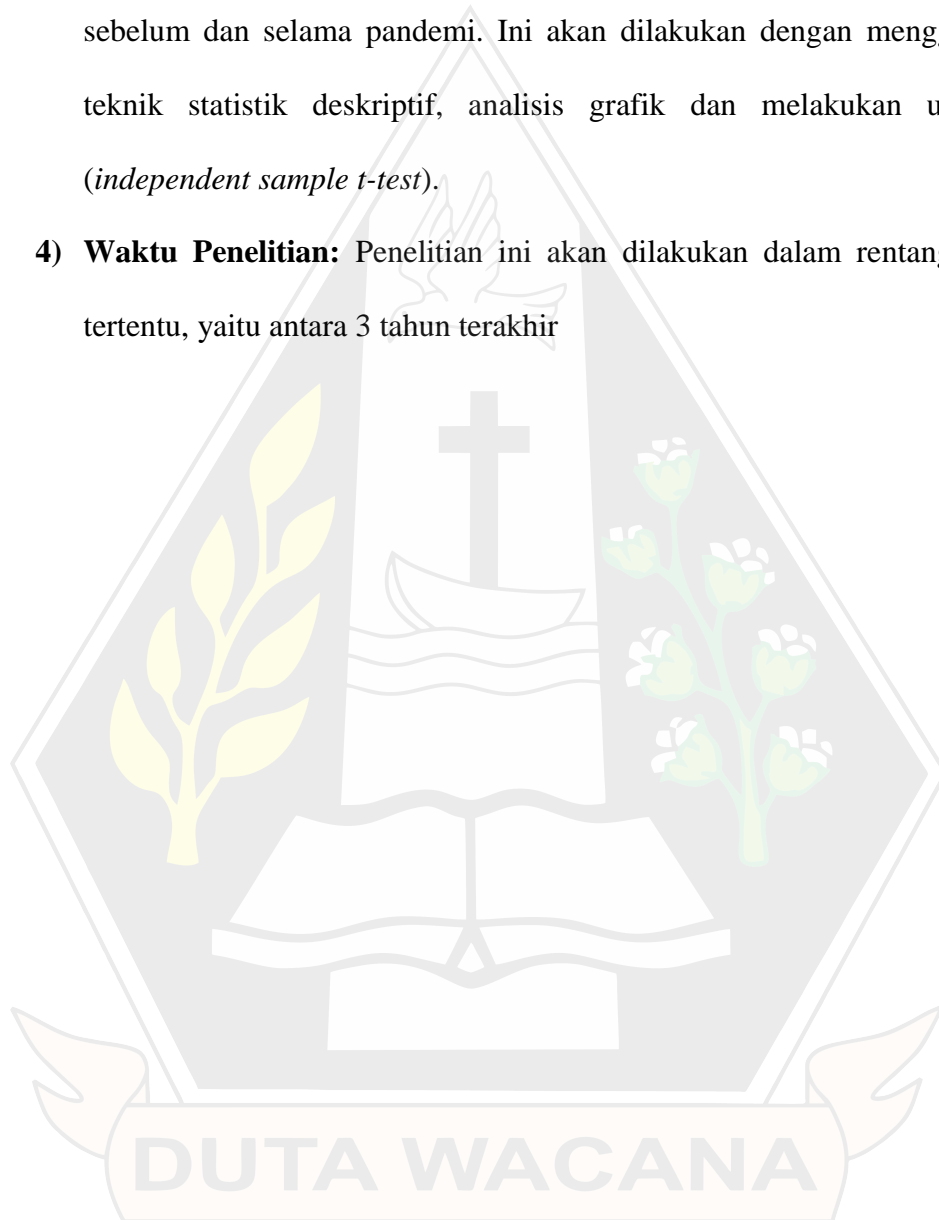
Dengan demikian, penelitian ini memberikan dasar untuk pengembangan strategi yang lebih baik dalam menghadapi situasi serupa di masa depan (Zulmarni dan Yuliarti 2023).

### **1.5 Batasan Penelitian**

Peneliti melakukan pembatasan masalah pada:

- 1) **Ruang Lingkup Penelitian:** Penelitian ini tidak akan membahas faktor lain yang mungkin mempengaruhi pendapatan asli daerah, tetapi akan berkonsentrasi pada pajak daerah dan retribusi daerah sebelum pandemi COVID-19 dan selama pandemi COVID-19.

- 2) **Sumber Data:** Peneliti menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah terkait pajak daerah dan retribusi daerah.
- 3) **Metode Penelitian:** Penelitian ini akan melihat bagaimana pajak daerah dan retribusi daerah berdampak ketika terjadi wabah pandemi COVID-19 sebelum dan selama pandemi. Ini akan dilakukan dengan menggunakan teknik statistik deskriptif, analisis grafik dan melakukan uji beda (*independent sample t-test*).
- 4) **Waktu Penelitian:** Penelitian ini akan dilakukan dalam rentang waktu tertentu, yaitu antara 3 tahun terakhir



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Pajak provinsi di Indonesia selama pandemi COVID-19 justru menurun pada tahun 2020, tidak seperti pada tahun 2018 yang justru meningkat tajam kecuali, pajak rokok yang menunjukkan tren positif dari tahun 2018 hingga 2020. Sementara itu, pajak kabupaten dan kota di Indonesia justru menurun pada tahun 2020, setelah sempat meningkat pada tahun 2019. Penurunan tersebut kemungkinan disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap sejumlah sektor ekonomi. Namun, jika dibandingkan dengan pajak lainnya, ppj psbw menunjukkan tren yang lebih baik.

#### **5.2 Saran**

Saran dari peneliti yaitu:

1. Untuk tujuan memberikan informasi kepada pembaca dan pengelola laporan keuangan daerah dapat terus memberikan pembaruan situs web.
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel 5 periode dalam penelitian untuk memeriksa masalah terkait isu sebelum, selama, dan setelah COVID-19.

**DUTA WACANA**

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Nur Fadilah, Sabaruddin Garancang, Kamaluddin Abunawas, Muhammadiyah Makassar, Islam Negeri, dan Alauddin Makassar. 2023. "KONSEP UMUM POPULASI DAN SAMPEL DALAM PENELITIAN" 14, no. 1: 15–31.
- Arianto, Bambang. 2021. "Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Dunia." *Jurnal Ekonomi Perjuangan* 2, no. 2. <https://doi.org/10.36423/jumper.v2i2.665>.
- Chairani, Ikfina. 2020. "Dampak Pandemi COVID-19 Dalam Perspektif Gender Di Indonesia." *Jurnal Kependudukan Indonesia* 2902: 39. <https://doi.org/10.14203/jki.v0i0.571>.
- Hadian, Bagas Jihad, dan Herman Ernandi. 2022. "The Influence of Money Ethics, Love of Money, Materialism, and Religiosity on Tax Avoidance with Financial Conditions as Moderating Variables." *Indonesian Journal of Innovation Studies* 20: 1–16. <https://doi.org/10.21070/ijins.v20i.720>.
- Halkadri, Fitra. 2016. "Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang Setelah Dikeluarkannya Undang-undang Otonomi Daerah." *Jurnal Praktek Bisnis* 5: 51–66.
- Ilanoputri, Salsabila Aufadhia. 2020. "PEMBAYAR PAJAK BERDASARKAN PENERAPAN BEBAN PAJAK DAERAH YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG PAJAK DAN" 4: 143–56. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.2067>.
- Ishida, Kazuyuki. 2011. "The Growth and Stability of the Local Tax Revenue in

Japan.” *Public Budgeting and Finance* 31, no. 1: 56–75.

<https://doi.org/10.1111/j.1540-5850.2011.00974.x>.

- Kraus, Sascha, Thomas Clauss, Matthias Breier, Johanna Gast, Alessandro Zardini, dan Victor Tiberius. 2020. “The economics of COVID-19: initial empirical evidence on how family firms in five European countries cope with the corona crisis.” *International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research* 26, no. 5: 1067–92. <https://doi.org/10.1108/IJEBR-04-2020-0214>.
- Kustiawati, Dedek, Anisa Anisa, Ersita Afiyah Utami, dan Najmina Khoirunnisa. 2023. “Analisis Pendapatan Nasional: Kota Jakarta.” *ETNIK: Jurnal Ekonomi dan Teknik* 2, no. 1: 54–59. <https://doi.org/10.54543/etnik.v2i1.141>.
- Moonti, Roy Marthen. 2017. “HAKIKAT OTONOMI DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA.” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 2: 9–15.  
<https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/9>.
- Nurul Hidayati Alfiani, Baiq Anggun Hilendri Lestari, dan Isnawati Isnawati. 2022. “Analisis Dampak COVID-19 terhadap Penerimaan Retribusi Sewa Toko pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur.” *Formosa Journal of Multidisciplinary Research* 1, no. 5: 1233–48.  
<https://doi.org/10.55927/fjmr.v1i5.1262>.
- Oktavia, Kinanti, M Taufiq, Riko Setya Wijaya, Universitas Pembangunan, Nasional Veteran, dan Jawa Timur Abstract. 2023. “Pengaruh COVID-19 Terhadap Perekonomian Setiap Negara Menggunakan Python.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Oktober* 9, no. 20: 425–36.  
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8419445>.

- Sarundayang, Markus Stenny, Herman Karamoy, dan Robert Lambey. 2018. "Analisis Potensi Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Di Kota Manado." *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 13, no. 02: 273–81. <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19269.2018>.
- Szalai, Ákos, dan Álmos T. Tassonyi. 2004. "Value-based property taxation: Options for Hungary." *Environment and Planning C: Government and Policy* 22, no. 4: 495–521. <https://doi.org/10.1068/c0132>.
- Valeriani, Devi, dan Ayu Wulandari. 2022. "Ekonomi Bangka Belitung dan COVID-19." *Sorot* 17, no. 1: 9. <https://doi.org/10.31258/sorot.17.1.9-24>.
- Wahyu, Fitri Pebriani. 2023. "Optimalisasi Penerimaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Berkelanjutan di Indonesia." *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik*, no. 2: 1–11.
- Widiyanto3, Khoiril Soleh Nur, Andri Waskita Aji, dan Anita Primastiwi. 2023. "Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Pajak Daerah: Studi Kasus Pemkab Gunungkidul Andri." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 4: 1147–54. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i5.2614>.
- Zulmarni, Pertiwi, dan Yuliarti Yuliarti. 2023. "Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah di Kota Padang." *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 5, no. 1: 1–11. <https://doi.org/10.47134/villages.v5i1.58>.